

**PENERAPAN SISTEM HONGKONG *SPECIAL*
ADMINISTRATIVE REGION 香港特别行政区 (HKSAR) DALAM
BIDANG POLITIK DAN EKONOMI**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar

Sarjana Sastra

Oleh

LIANA CAROLIN

02120007



JURUSAN SASTRA CINA

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2007

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul:

**PENERAPAN SISTEM HONGKONG *SPECIAL*
ADMINISTRATIVE REGION 香港特别行政区 (HKSAR) DALAM
BIDANG POLITIK DAN EKONOMI**

Oleh

Liana Carolin

Nim: 02120007

Disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi Sarjana.

Mengetahui:

Ketua Jurusan Sastra Cina SI



C. Dewi Hartati, M.Si

Pembimbing



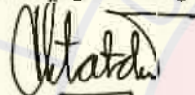
C. Dewi Hartati, M.Si

Skripsi yang berjudul

**PENERAPAN SISTEM HONGKONG *SPECIAL*
ADMINISTRATIVE REGION 香港特别行政区 (HKSAR) DALAM
BIDANG POLITIK DAN EKONOMI**

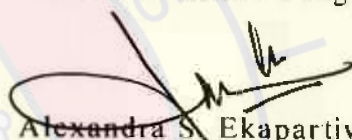
telah diujikan dan diterima baik (lulus) pada tanggal 31 Juli 2007 di
hadapan Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Sastra.

Pembimbing / Penguji



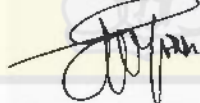
C. Dewi Hartati, M.Si

Ketua Panitia / Penguji



Alexandra S. Ekapartwi, SS

Pembaca / Penguji



Emi Yasusi Susanti, SS

Disahkan oleh

Ketua Jurusan Sastra Cina



C. Dewi Hartati, M.Si

Dekan Fakultas Sastra



FAKULTAS SASTRA

Dr. Hj. Albertine S. Minderop, MA

Skripsi Sarjana yang berjudul:

**Penerapan Sistem Hongkong *Special Administrative Region* 香港
特别行政区 (HKSAR) Dalam Bidang Politik dan Ekonomi**

Merupakan karya ilmiah saya dibawah bimbingan Ibu C. Dewi Hartati, M.Si, tidak merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, dan isinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Pernyataan ini saya buat dan sesungguhnya di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2007.

Liana Carolin

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah Bapa di Surga, oleh karena Anugerah dan Kasih Karunia-Nya saja penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Fakultas Sastra Cina Universitas Darma Persada.

Setelah melalui proses pencarian sumber-sumber data yang penulis dapatkan baik dari beberapa sumber buku maupun situs-situs internet, maka pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis merasa bersyukur karena pada akhirnya skripsi ini dapat selesai pada waktunya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Ibu C. Dewi Hartati, M.Si selaku Ketua Jurusan Sastra Cina Universitas Darma Persada sekaligus Dosen Pembimbing penulis. Tanpa dorongan serta motivasi dari Ibu penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk kesabaran Ibu selama ini.
2. Ibu Alexandra S. Ekapartwi, SS selaku PUDEK III sekaligus Ketua Panitia Sidang Skripsi Penulis. Terima kasih untuk segala hal yang telah Ibu ajarkan kepada penulis. Setiap

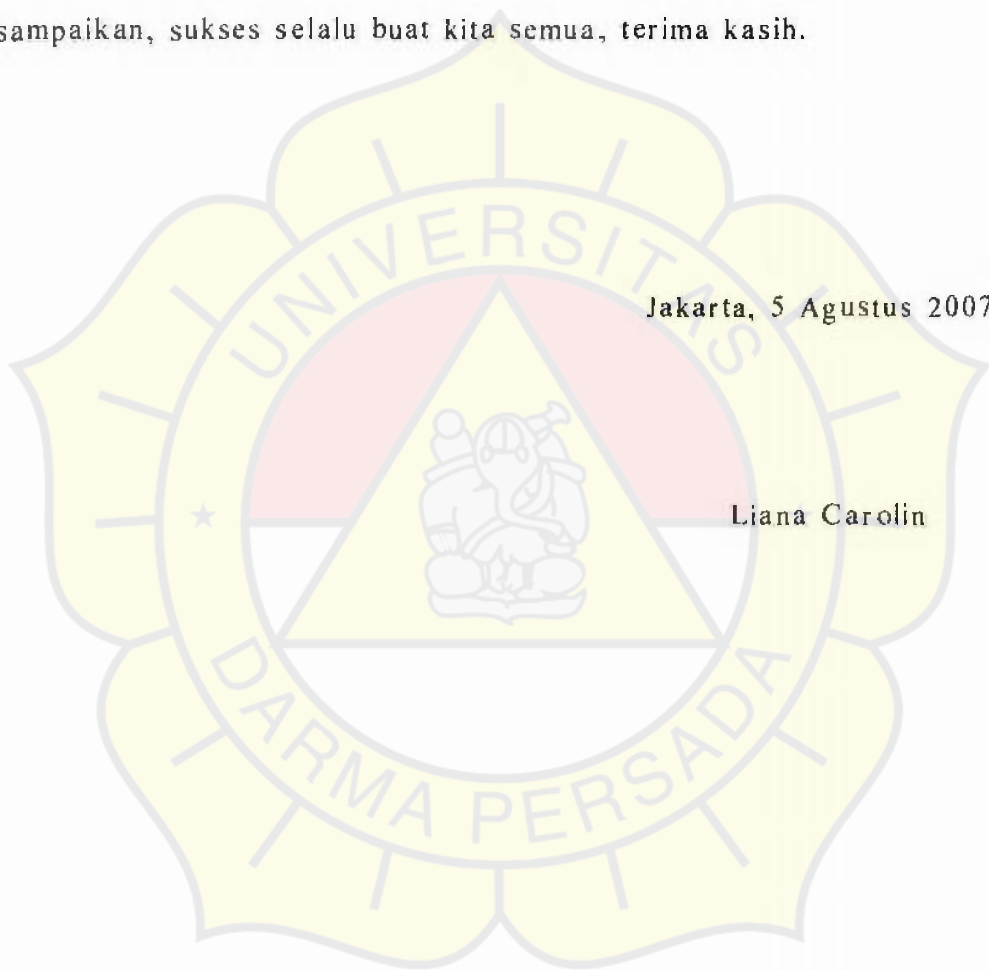
dorongan motivasi yang Ibu sampaikan kepada penulis sangat bermanfaat sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Emi Yasusi Susanti, SS selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembaca dalam Sidang Skripsi penulis. Terima kasih Ibu bersedia membaca skripsi penulis dan sangat membantu penulis pada saat sidang.
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Sastra Cina yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk didikan yang Laoshi ajarkan selama masa perkuliahan.
5. Untuk seorang wanita yang tangguh yang telah bekerja keras untuk membiayai kuliah penulis, Mama Tersayang. Terima kasih buat kesabaran Mama selama ini, walaupun uwin mundur 1 tahun tetapi Mama tidak pernah marah. Skripsi ini uwin persembahkan buat mama, I love you mom.
6. Teman-temanku se-angkatan ('02) dan seperjuangan: Dini, Sukaesih, Yuli. Terima kasih buat dukungan yang kalian berikan dan yang terpenting akhirnya kita jadi Sarjana.
7. Kepada semua teman yang mengenal penulis dan yang menyayangi penulis dan begitupun sebaliknya. Terima kasih buat semua kasih sayang, semangat yang kalian berikan, mohon maaf karena tidak dapat menyebutkan nama kalian satu persatu, tapi kalian selalu ada di hatiku selamanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta dapat memberikan kontribusi berarti yang mungkin dapat membantu para pembaca untuk lebih mengenal sejarah Cina, terutama mengenai Hongkong. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, sukses selalu buat kita semua, terima kasih.

Jakarta, 5 Agustus 2007

Liana Carolin



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Bab I Pendahuluan	1
1. 1 Latar Belakang Masalah	1
1. 2 Permasalahan Penelitian	4
1. 3 Tujuan Penulisan	5
1. 4 Kerangka Teori	6
1. 5 Hipotesis	8
1. 6 Metode Penulisan	8
1. 7 Sistematika Penulisan	9
1. 8 Sistem Ejaan	11

Bab II Penerapan Sistem HKSAR Dalam Bidang Politik

- 2. 1 Permulaan Era Politik Yang Baru 12
- 2. 2 Pelaksanaan Sistem HKSAR Dalam Bidang Politik ...19

Bab III Penerapan Sistem HKSAR Dalam

- Bidang Ekonomi**28
- 3. 1 Hongkong Dalam Era Kolonial Inggris.....28
- 3. 2 Hongkong Di Tahun Pertama SAR37
- 3. 3 Pelaksanaan Sistem HKSAR Dalam
Bidang Ekonomi 44

Bab IV Kesimpulan 51

Glosari55

Bibliografi58

Lampiran Undang-Undang Dasar61

Lampiran Peta Regional Hongkong-Cina 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut *Ensiklopedi Indonesia Geografi Asia*, Hongkong terletak di pantai tenggara Republik Rakyat Cina (RRC) dengan luas wilayah sekitar 1.044,6 KM², memiliki lebih dari dua ratus tiga puluh pulau lain di selatan sungai Mutiara.

Pada bulan November 1839, pecahlah perang antara Inggris dan Dinasti Qing, pada saat itu RRC belum terbentuk. Perang tersebut lebih dikenal sebagai Perang Candu. Dinasti Qing harus menelan kekalahan, dan merelakan Hongkong sebagai negara koloni Inggris (W.D. Sukisman, 1992:54). Akan tetapi Cina masih menganggap bahwa Hongkong merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan Cina.

Sejak diproklamirkan berdirinya negara RRC pada tanggal 1 Oktober 1949, maka selama dua tahun pemerintahan, RRC telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Cina, kecuali pulau Taiwan yang masih dikuasai oleh sisa-sisa pemerintahan Nasionalis Cina. Sedangkan Hongkong dan Makao (*Ao Men* 澳門) masih tetap berstatus koloni, masing-masing dari Inggris dan Portugal (W.D. Sukisman, 1993:55). Usaha pemerintah RRC untuk menguasai

kembali Hongkong mendapat beberapa kendala, maka pada tanggal 8 Maret 1972 Cina melaporkan kepada Komite Khusus PBB dalam Dekolonisasi tentang "penyelesaian masalah Hongkong dan Makao yang merupakan hak kuasa Cina". Sejalan dengan kebijakan pemerintah RRC untuk meningkatkan perekonomian RRC pada tahun 1970-an, pemerintah Cina mulai menanamkan modalnya di Hongkong. Pada tanggal 1 Januari 1980 diberlakukan perubahan konstitusi yang baru dan juga yang pertama kali dilakukan pemerintah RRC dalam usahanya melaksanakan penyatuan kembali Hongkong dan Makao. Untuk itu Kongres Rakyat Nasional (*quan guo renmin daibiao dahui* 全国人民代表大会) membentuk Komisi Pembaharuan Konstitusi yang berhasil membuat rancangan konstitusi yang diperbaharui. Salah satu pasal dalam rancangan konstitusi baru yang tercantum dalam pasal 31 khusus dibuat untuk pembentukan wilayah administrasi khusus.

Pasal ini terutama dipersiapkan untuk menyelesaikan masalah masa depan Hongkong, Taiwan dan Makao. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut (Endi Rukmo, "Hongkong di bawah Kedaulatan RRC", Analisa tahun XIII, no. 12, Desember 1984, hal. 941):

"Negara mengizinkan, jika perlu membentuk wilayah administrasi khusus, Undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah-daerah khusus itu akan ditentukan oleh hukum menurut kondisi spesifik."

Berdasarkan pasal 31 ini secara terbuka pada bulan Juli 1982, Peng Zhen, wakil ketua Kongres Rakyat Nasional menyatakan bahwa pemerintah RRC akan mengambil alih kembali atas Hongkong, Taiwan dan Makao.

Perundingan tentang status Hongkong mulai dilakukan ketika Perdana Menteri Inggris, Margareth Thatcher, mengunjungi Beijing bulan September 1982. Thatcher mengadakan serangkaian pembicaraan dengan pemimpin Cina Deng Xiaoping mengenai status Hongkong. Setelah kunjungan Perdana Menteri Thatcher, dimulailah pembahasan RRC-Inggris mengenai masa depan Hongkong. Pembahasan yang lebih terperinci dan perundingan resmi yang pertama antara RRC dan Inggris dimulai pada pertengahan bulan Juli 1983. Perundingan resmi ini berlangsung selama 22 kali yang berakhir awal bulan September 1984 (William A. Joseph, 1997:151).

Setelah melalui perundingan yang cukup berat selama dua tahun, pemerintah RRC dan pemerintah Inggris berhasil menyusun Deklarasi Bersama tentang masa depan Hongkong. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1984 di Beijing, Perdana Menteri Margareth Thatcher dan Perdana Menteri Zhao Ziyang menandatangani *Sino-*

British Joint Declaration (Deklarasi Bersama). Pokok dari isi Deklarasi Bersama tersebut adalah tentang pengaturan Hongkong setelah RRC mengambil kembali kedaulatannya pada tanggal 1 Juli 1997. Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa Hongkong menjadi daerah spesial administratif atau disebut juga *Hongkong Special Administrative Region* (HKSAR) atau dalam istilah Bahasa Mandarinnya *xianggang tebie xingzheng qu* 香港特别行政区. Sistem ekonomi kapitalis masih tetap dipertahankan selama 50 tahun terhitung mulai tahun 1997.

1.2 Permasalahan Penelitian

Bermula dari proses panjang pemerintah Beijing untuk dapat mengembalikan Hongkong kepada kedaulatan seutuhnya, yaitu bersatu kembali dengan RRC, sampai pada penandatanganan Deklarasi Bersama antara RRC dan Inggris yang sangat menentukan masa depan Hongkong selanjutnya. Dan pada akhirnya Hongkong ditetapkan menjadi Daerah Spesial Administratif (*xianggang tebie xingzheng qu* 香港特别行政区), yang menjadi pokok permasalahan adalah, “Bagaimanakah pelaksanaan sistem HKSAR yang diberlakukan di Hongkong?”

1.3 Tujuan Penulisan

Sejak diproklamkan berdirinya Negara RRC dalam kurun waktu dua tahun, pemerintahan RRC telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Cina. Akan tetapi Hongkong dan Makao masih tetap berstatus koloni, karena alasan tersebut pemerintah RRC bersikeras agar Hongkong dan Makao dapat kembali ke pangkuan kesatuan Republik Rakyat Cina. Tidak diragukan lagi bahwa suatu negara yang baru memproklamkan kedaulatannya menginginkan penyatuan wilayah-wilayah kenegaraannya, oleh sebab itulah dimulai perjalanan panjang RRC untuk mengambil alih kembali Hongkong dan Makao.

Pada tahun 1978 dan 1979, RRC memasuki periode sejarah yang baru. Periode ini ditandai dengan adanya tujuan modernisasi yang cepat. Program-program yang disusun dimaksudkan untuk mengubah RRC pada akhir abad ke-20 menjadi suatu negara sosialis yang kuat dan modern. Disebutkan juga bahwa tiga tujuan utama RRC pada dekade 80-an, adalah modernisasi ekonomi, memberantas hegemoni, dan melakukan penyatuan kembali wilayah-wilayahnya yang jatuh ke pihak asing. Cina yang dikenal oleh dunia internasional sebagai negara Sosialis Komunis yang bercirikan Cina menetapkan prinsip "satu negara dua sistem" (*yiguo liangzhi* 一国两制) dengan memberlakukan sistem HKSAR.

Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, menjelaskan bagaimana sistem HKSAR yang diberlakukan pemerintah RRC atas Hongkong serta pelaksanaannya dalam hidup bernegara.

1. 4 Kerangka Teori

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan, dibutuhkan teori-teori untuk membantu menganalisis permasalahan tersebut. Daerah administrasi khusus dapat disebut juga sebagai daerah otonomi khusus, dalam hal ini kata "otonomi" berasal dari pelaksanaan asas desentralisasi, yang menimbulkan daerah-daerah otonom. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hanya pemerintahan yang terdesentralisasi yang memerlukan otonomi.

Secara umum desentralisasi menurut studi Bank Dunia yang dilakukan oleh Rondinelli (1981, 1989) sebagaimana dikutip oleh Dillinger (1994) pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

- a) Desentralisasi Politik (*Political Decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik. Desentralisasi politik pada umumnya berkaitan dengan sifat pluralistik di bidang politik dalam proses ke arah lebih demokratis dengan memberikan kewenangan pada lembaga

perwakilan rakyat untuk lebih berperan dalam memformulasikan dan melaksanakan kebijakan publik.

b) Desentralisasi Administratif (*Administrative Desentralization*), yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggung jawab itu terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.

Di sisi lain, desentralisasi mengandung dua pengertian. Pertama, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom tersebut. Kedua, desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian otonomi yang merupakan pelaksanaan asas desentralisasi, semula berarti hak untuk mengatur dan memerintah sendiri. Kemudian dalam perkembangannya otonomi berarti kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerahnya, dengan keuangan, hukum, dan pemerintahan sendiri.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan dua teori tersebut diatas yang kemudian dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang diberlakukan atas Hongkong untuk 50 tahun kedepan terhitung sejak 1 Juli 1997, yaitu pemerintah RRC menetapkan Hongkong menjadi Daerah Spesial Administratif dengan derajat otonomi yang tinggi serta kebebasan untuk Hongkong mengatur sendiri pemerintahannya, maka sistem tersebut berlaku untuk 50 tahun lebih dan dibiarkan seperti demikian oleh pemerintah RRC.

1.6 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penggambaran atas suatu obyek atau kejadian yang akan diteliti secara sistematis. Kemudian dengan data-data primer dan sekunder yang diterima akan dilakukan analisis secara kualitatif. Untuk memperoleh data-data mengenai penerapan HKSAR penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang bersangkutan baik itu merupakan buku-buku, laporan, pengaturan atau keputusan pemerintah, karya ilmiah, tulisan-tulisan disurat kabar serta media cetak lainnya.

Sumber kepustakaan yang penulis gunakan adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah tulisan-tulisan atau gagasan-gagasan orang-orang yang hidup dan mengalami peristiwa tersebut, baik berupa buku, artikel, berita dan sebagainya. Sumber sekunder adalah bahan-bahan tulisan yang mengupas permasalahan tersebut yang ditulis oleh sarjana-sarjana yang melakukan penelitian tentang Cina, ataupun sumber-sumber dari Website-Website pemerintah Hongkong ataupun yang ada hubungannya dengan ekonomi dan politik Hongkong di Internet.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipergunakan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan lebih banyak membahas latar belakang permasalahan dari skripsi yang penulis tuliskan, berikut dengan tujuan, kerangka teori yang penulis pergunakan, serta metode penulisan yang dipakai dalam skripsi.

BAB II. PENERAPAN SISTEM HKSAR DALAM BIDANG POLITIK

Pada bab dua ini penulis akan membahas permulaan era politik yang baru yang terjadi di Hongkong berdasarkan sumber-sumber data yang penulis dapatkan dari beberapa sumber buku, koran-koran yang terbit pada masa pengembalian Hongkong serta dari situs-situs internet yang berkaitan dengan Hongkong. Pembahasan kemudian dilanjutkan kepada pelaksanaan kehidupan berpolitik di Hongkong.

BAB III. PENERAPAN SISTEM HKSAR DALAM BIDANG EKONOMI

Pada bab tiga ini penulis memaparkan keadaan awal ekonomi Hongkong di tahun pertama SAR. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan pelaksanaan kehidupan ekonomi Hongkong, tentunya penulisan tersebut juga didasari oleh sumber-sumber yang penulis dapatkan baik dari buku-buku, koran, ataupun situs internet.

BAB IV. KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan sekaligus penutup dari skripsi. Pada bab ini penulis merangkumkan keseluruhan isi skripsi.

1. 8 Sistem Ejaan

Perlu penulis jelaskan bahwa nama-nama atau istilah-istilah dalam bahasa Cina dituliskan berdasarkan ejaan *Pinyin*, atau ejaan yang telah diperbaharui dan yang digunakan secara resmi di Cina sejak tahun 1956. Namun demikian, nama-nama dan istilah-istilah yang telah populer tetapi sebenarnya bukan merupakan ejaan *Pinyin* tetap dipertahankan, misalnya Hongkong, Kowloon, dan lain-lain.